



HERI SUSANTO/JOGLO JOGJA

SIDAK: Kepala DPMPSTP Kota Jogja, Budi Santosa saat meninjau KB-TKIT Salman Al Farisi di Kelurahan Warungboto, Umbulharjo, kemarin (28/4).

Pemkot Sisir Perizinan Daycare di Warungboto

Buntut Kasus Little Aresha

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai bergerak melakukan pengetatan pengawasan terhadap operasional daycare, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Kanak-Kanak (TK). Langkah itu diambil menyusul mencuatnya dugaan kasus kekerasan anak yang terjadi di daycare Little Aresha baru-baru ini.

Pada Selasa (28/4), tim gabungan menyisir sejumlah

lembaga pendidikan anak usia dini di wilayah Kelurahan Warungboto, Umbulharjo. Salah satu yang disambangi adalah KB-TKIT Salman Al Farisi untuk mengecek kepatuhan perizinan serta kelayakan standar pelayanan perlindungan anak.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Jogja, Budi Santosa mengungkapkan, dari hasil pantauan lapangan, mayoritas standar sarana prasarana. Namun, persoalan administrasi masih menjadi catatan merah.

“Kami menemukan ada izin operasional yang akan kedaluwarsa pada Mei dan Juli mendatang. Kami tekankan kepada pengelola agar segera mengurus perpanjangan sebelum masa berlakunya habis,” tegas Budi di sela-sela peninjauan.

Budi merinci, setiap pengelola wajib melewati dua tahapan legalitas. Dimulai dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), kemudian dilanjutkan dengan izin operasional dari pemerintah daerah yang melibatkan verifikasi lapangan bersama Dinas Pendidikan.

“Kami sedang sinkronisasi data lembaga yang berizin dan tidak. Prinsipnya kami kedepankan pembinaan, tidak langsung tutup. Akan ada klasifikasi perlakuan bagi yang izinnya mati atau yang memang belum pernah mengajukan sama sekali,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Retnaningtyas menyebut, pengawasan kini dilakukan lebih kolaboratif. Pihaknya fokus pada sisi perlindungan anak, sementara

Dinas Pendidikan menangani teknis penyelenggaraan pendidikannya.

Beberapa indikator ketat pun diterapkan, mulai dari rasio jumlah pengasuh dibanding anak, kualitas sanitasi, hingga integrasi layanan kesehatan dengan puskesmas setempat.

“Daycare bukan sekadar tempat menitipkan anak. Harus ada kurikulum dan stimulasi pendidikan yang jelas. Selain itu, transparansi seperti keberadaan CCTV dan pola komunikasi dengan orang tua menjadi poin krusial untuk menjamin keamanan,” papar Retnaningtyas. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 18 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005